



Kementerian PPN/
Bappenas

Arah Kebijakan Nasional Pengembangan Koperasi

disampaikan pada kegiatan:
**Diskusi Dukungan Kementerian dalam Pengembangan
Koperasi Desa Merah Putih**

Wakil Menteri PPN / Wakil Kepala Bappenas

Jakarta, 12 Maret 2025

Isu Strategis: Kontribusi Koperasi terhadap Perekonomian

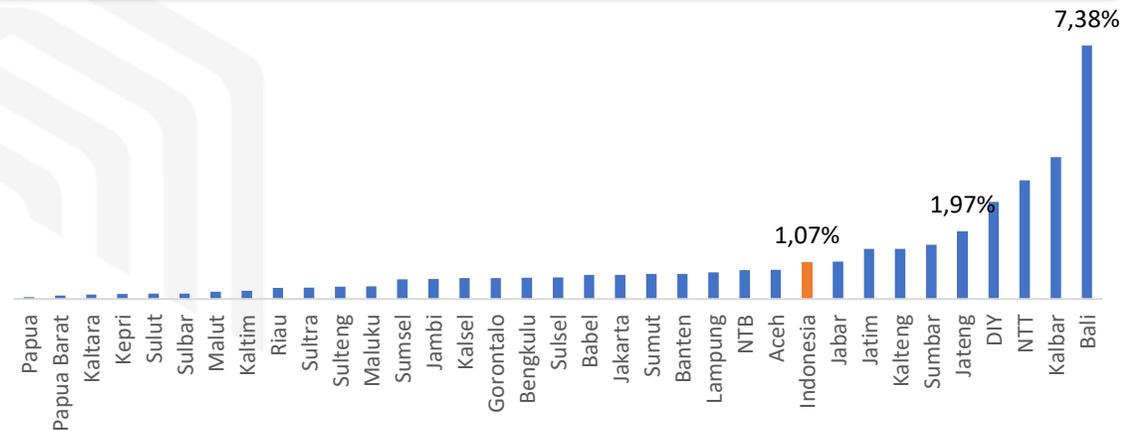
Kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional masih rendah, ditunjukkan dari proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB Nasional **hanya sebesar 1,07% di tahun 2021**. Koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah dari sisi jumlah dan kontribusinya.

Volume Usaha Koperasi berdasarkan Lapangan Usaha 2021 (Rp Miliar)

Sektor Usaha Koperasi	Volume Usaha	Proporsi Volume Usaha	Jumlah Koperasi
Jasa Keuangan dan Asuransi	125,3 T	68,7%	55.514
Perdagangan Besar dan Eceran	22,5 T	12,3%	2.454
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,2 T	7,2%	11.705
Jasa Lainnya	8,5 T	4,6%	44.064
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,3 T	2,9%	10.640
Industri Pengolahan	2,1 T	1,2%	773
Sektor Usaha Lainnya ^[a]	5,6 T	3,1%	2.696
Total	182,35 T		127.846

- Kontribusi volume usaha koperasi utamanya berasal dari sektor jasa keuangan dan asuransi serta perdagangan.
- Koperasi sektor produksi (pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan) hanya berkontribusi 8,4% dari total volume usaha koperasi Indonesia.

Rasio Volume Usaha Koperasi Provinsi terhadap PDRB (2021)



Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB



Global : **4,30%**
Asia : **3,25%**
(2014)

Total Volume Usaha Koperasi terhadap PDB Nasional dan Jumlah Koperasi yang Masuk dalam 300 Besar Dunia





Peran Koperasi dalam RPJMN 2025-2029: Asta Cita Prioritas Nasional

1

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Cakupan Prioritas:

- Penumbuhan Koperasi

3

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Cakupan Prioritas:

- Penguatan Sektor Agromaritim
- Peningkatan Kompetensi Usaha

4

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Cakupan Prioritas:

- Pemberian MBG untuk Pemenuhan Gizi



5

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Cakupan Prioritas:

- Penguatan Rantai Nilai Produk
- Peningkatan Ekspor Produk

6

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Cakupan Prioritas:

- Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha
- Peningkatan Kemandirian Perdesaan

7

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8

PRIORITAS NASIONAL

- ✓ Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Cakupan Prioritas:

- Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa



Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Koperasi pada RPJMN 2025-2029

Arah Kebijakan

Sasaran: Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi.

Intervensi Kebijakan



Pengembangan Usaha Koperasi

1. Penyusunan *blueprint* koperasi sektor produksi.
2. Pengembangan koperasi sektor agromaritim dan sektor strategis.
3. Penguatan rantai pasok



Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan

1. Penyelesaian RUU Perkoperasian.
2. Advokasi kebijakan/regulasi.
3. Akses pembiayaan koperasi.
4. Pelibatan koperasi dalam program pemerintah atau pengadaan barang dan jasa.



Penguatan Kapasitas SDM dan Reputasi Koperasi

1. Bootcamp dan pemagangan.
2. Sosialisasi perkoperasian.
3. Pengembangan SDM perkoperasian.



Penguatan Sistem Pengawasan Koperasi

1. Sistem pengawasan koperasi.
2. Pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi.
3. Pengaturan perizinan koperasi.

Indikator dan Target Pembangunan

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB



Rasio Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi



Strategi pengembangan koperasi yang **transformatif** dibutuhkan untuk pencapaian target pembangunan



Dukungan Kementerian PPN/Bappenas melalui *White Paper* Pengembangan Koperasi Sektor Produksi

Urgensi Penyusunan



Amanat UU 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045, koperasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan. Peningkatan produktivitas koperasi utamanya koperasi sektor produksi.



Amanat Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam mengembangkan industri agromaritim dan swasembada pangan.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun *White Paper* Pengembangan Koperasi Sektor Produksi untuk menjadi pedoman strategis bagi pemangku kepentingan dalam melakukan transformasi koperasi sektor produksi.

Rekomendasi *White Paper*

- Aktualisasi Regulasi dan Kebijakan**
Advokasi regulasi dan kebijakan yang afirmatif.
- Peningkatan Akses Pendanaan**
Inovasi sumber dan mekanisme pendanaan.
- Sinkronisasi Peran K/L/D**
Sinergi program pengembangan koperasi antar K/L/D.
- Transformasi Kelembagaan Koperasi**
Tata kelola, manajemen, permodalan, dan pola usaha koperasi.
- Kerjasama dengan Mitra Pembangunan**
Peningkatan pengetahuan terhadap pengalaman global, keahlian teknis, dan pengembangan SDM.

White Paper perlu ditetaskan melalui ***Blueprint* Pengembangan Koperasi Sektor Produksi yang akan disusun oleh Kementerian Koperasi** di tahun 2025. Muatannya mencakup analisis komoditas potensial, mekanisme pengembangan, serta skema keterlibatan pemangku kepentingan.



Konsep Pengembangan Koperasi Sektor Produksi



Inkubasi Koperasi Sektor Produksi



Pengembangan Koperasi Skala Besar

Komoditas Prioritas Pengembangan



Beras



Jagung



Susu



Ikan



Rumput Laut



Kelapa Sawit



Kelapa



Kopi



Hortikultura

Intervensi Pengembangan

Kebijakan dan Kelembagaan

- Afirmatif dan insentif
- Koordinasi dan sinergi program antar K/L

Permodalan dan Pembiayaan

- Transformasi kontribusi modal oleh anggota
- Skema pembiayaan berbasis rantai pasok

Jaringan dan Kemitraan

- Riset dan tukar pengetahuan
- Kemitraan usaha
- Pengadaan barang dan jasa

Budaya dan Tata Kelola

- Profesionalisme pengelolaan
- Penggunaan teknologi
- Sosialisasi perkoperasian
- Model Koperasi Multi Pihak

Kualitas dan Kapasitas SDM

- Regenerasi SDM
- Pemagangan SDM
- Kewirausahaan anggota
- Sertifikasi dan perlindungan kerja

Pengembangan koperasi di sektor produksi memerlukan sinergi dan kolaborasi antar K/L.

1. Regulasi dan kebijakan afirmatif bagi koperasi.
2. Kolaborasi intervensi rantai nilai.
3. Insentif untuk pengembangan usaha koperasi.

Highlight Pengembangan

- Meningkatkan akses pembiayaan.
- Transformasi kelembagaan koperasi melalui konsorsium untuk tata kelola yang berkelanjutan.
- Membangun kemitraan antara koperasi dengan *offtaker*.
- Pelibatan Koperasi kepada program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan hilirisasi.



Relevansi *White Paper* dan Dukungan Bappenas terhadap Kopdes Merah Putih

Poin Relevansi

1. *White Paper* Pengembangan Koperasi Sektor Produksi dapat menjadi **pedoman awal** dalam menyusun rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
2. *White paper* telah memetakan **kebutuhan intervensi pengembangan** berdasarkan ekosistem usaha yang meliputi kebijakan dan kelembagaan, permodalan dan pembiayaan, jaringan dan kemitraan, budaya dan tata kelola, serta kualitas dan kapasitas SDM.
3. Program Kopdes merupakan program kebijakan afirmatif yang berpotensi **meningkatkan kontribusi koperasi**.
4. Program Kopdes sangat berpotensi untuk menerapkan konsep **industrialisasi dan hilirisasi koperasi**.
5. Program Kopdes dapat mengkonsolidasikan pengembangan potensi ekonomi desa dengan lembaga-lembaga ekonomi di desa sehingga terwujudnya integrasi rantai nilai hulu-hilir.

Dukungan Bappenas

1. Mengkoordinasikan pencantuman program Kopdes Merah Putih pada dokumen perencanaan.
2. Memberikan masukan terhadap penyusunan konsep dan implementasi Kopdes Merah Putih.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
4. Mengkoordinasikan potensi keterlibatan mitra pembangunan untuk Kopdes Merah Putih.



Rekomendasi Pengembangan Kopdes Merah Putih

1. Kopdes perlu diarahkan untuk menjadi **koperasi sektor produksi** yang dapat mengorganisir dan meningkatkan efisiensi hasil produk pertanian dan perikanan.
2. Pembentukan Kopdes memerlukan **pendekatan partisipatif**.
3. Perlu adanya **pendampingan** pembentukan Kopdes.
4. Kopdes perlu diproyeksikan untuk menjadi **mandiri** dan berorientasi untuk tumbuh.
5. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, Kopdes memerlukan **skala ekonomi yang lebih besar**.
6. Usulan **model pembentukan Kopdes**:
 - i. Transformasi Koperasi Eksisting
 - ii. Pembentukan koperasi dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), atau Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan)
 - iii. Pembentukan koperasi sebagai unit usaha BUMDesa/BUMDesma
 - iv. Pembentukan Koperasi Multi Pihak yang terdiri dari Gapoktan, Pokdarwis, Pokdakan, BUMDesa, dan lembaga lainnya.
7. Perlu disusun **peta jalan, mitigasi risiko, skema pendanaan** yang berkelanjutan, dan skema pengembangan program yang adaptif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.



TERIMA KASIH



Arah Kebijakan Nasional Pengembangan Koperasi

12 Maret 2025

Tim Penyusun

Jabatan	Nama	NIP
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Maliki, ST, MSIE, Ph.D	19710828 199703 1 003
Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi	Mahatmi Parwitasari Saronto, ST., MSIE	19710905 199703 2 001
Koordinator	Harry Lesmana, ST., MPA	19870403 201012 1 007
Staf	Mayong Firdaus, ST	PPNPN
	Aditya Dwi Prasetyo, ST	PPNPN
	Alfira Azzahra Putri Tabrani, ST	PPNPN

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional